

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Setengah abad lebih Indonesia merdeka ternyata telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kancah perpolitikan baik dalam skala internasional, nasional, dan lokal. Ini tidak lepas dari masuk dan dianutnya demokrasi di Indonesia. Tentunya sebagai bagian dari demokrasi bukan hanya terkait dengan kebebasan yang menjadi *jargon* utama disini tapi juga ketertarikan masyarakat untuk berkecimpung didunia politik, baik sebagai aktor langsung, komentator, atau bahkan sebagai partisipan yang lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ichlasul (2012:2):

”Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Semakin luas pertumbuhan fungsi-fungsi dan kebebasan majelis politik, maka semakin tumbuh kesadaran para anggotanya untuk membentuk kelompok antar mereka dan bersaing dalam pentas politik. Semakin luas hak individu untuk memberikan suaranya, semakin mendesak pula keperluan pembentukan komite untuk mengorganisir dan menyalurkan suara para pemilih, serta menyelidiki calon-calon untuk mereka pilih. Dengan demikian kebangkitan partai politik sejalan dengan kebangkitan kelompok-kelompok dalam parlemen dan komite-komite pemilihan. Sekalipun demikian, perkembangan partai politik terjadi baik didalam maupun di luar lingkungan parlemen, dengan karakteristiknya yang saling berbeda.”

Pendapat Ichlasul diatas juga diperkuat oleh Anggara. Menurut Anggara (2013:273), suatu negara dikatakan Demokrasi ditandai dengan beberapa ciri, seperti: 1) partisipasi politik yang luas; 2) Kompetisi politik yang sehat; 3) Sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala melalui proses pemilu; 4)

Pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; 5) Diakuinya kehendak mayoritas; serta 6) Adanya tata krama politik yang disepakati dalam masyarakat. Dari keenam ciri tersebut di atas dapat ditarik garis lurus bahwasannya kehadiran politik dalam suatu negara demokrasi menjadi sangat penting dan struktur.

Tuntutan adanya partisipasi politik yang luas dan kompetisi politik yang sehat sebagaimana tersebut pada ciri pertama dan kedua bagi negara demokratis di atas memaklumkan dianutnya sistem multi partai dari suatu negara demokratis.

Menurut Miriam Budiardjo (1998:257): di Indonesia telah menganut sistem multipartai, sekalipun gejala partai tunggal, begitu pula gejala dwipartai, tidak asing dalam sejarah Indonesia. Terutama pada era Orde Baru sudah menganut sistem multi partai terbatas dengan tiga orsospol yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Sistem ini berlangsung dari pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu terakhir sebelum tumbanganya Orde Baru pada tahun 1997.

Sejak era Reformasi, Indonesia menganut sistem multi partai terbuka. Pada pemilihan umum tahun 1999 di ikuti oleh 48 partai yaitu: Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangkitan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Indonesia, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarekat Islam Indonesia 1905, Partai Katholik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai

Nahdlatul Umat, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Rakyat, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Umat Muslimin Indonesia. Pada tahun 2004 di ikuti oleh 24 partai politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Dan Partai Pelopor. Tahun 2009 di ikuti oleh 44 partai politik, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa,

Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republik Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Merdeka, Partai Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia, Dan Partai Buruh. Tahun 2014 sesuai dengan keputusan KPU hanya di ikuti oleh 12 partai saja yaitu: Partai Nasional Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangua, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dengan dianutnya sistem multipartai di Indonesia akhirnya membuat jumlah partai politik semakin banyak. Menjamurnya partai politik di Indonesia karena sebagian masyarakat sadar bahwa partai politik memang mamberikan peranan yang sangat penting bagi sebuah negara seperti yang dijelaskan oleh Sunggono (1992: 4):

“keberadaan dan peran dari partai politik adalah penting, yang pada umumnya meliputi kegiatan partisipasi di lembaga-lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum (pemilu), maupun ikut serta dalam membentuk dan

menentukan haluan negara serta pelaksanaannya dan kemudian mengawasi apakah pelaksanaan itu sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan”.

Lebih jelasnya lagi partai politik juga merupakan wadah untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta penyalur aspirasi dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi acuan penting adanya partai politik bagi sebuah negara.

Dalam sebuah negara yang demokrasi partai politik dituntut untuk lebih agresif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Seperti yang dijelaskan oleh Koirudin (2004: 77):

“partai politik dapat dihadapkan pada krisis kepercayaan bila sebagai pranata demokrasi, partai politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi klasiknya, terutama tidak bertautan dengan dinamika politik arus bawah. Realitas politik dewasa ini makin menunjukkan kecenderungan kelompok-kelompok masyarakat terutama lapisan bawah untuk mengedepankan tuntutan dan pemenuhan kepentingan melalui bentuk-bentuk pengorganisasian dan aksi mandiri, tidak diartikulasikan atau diperjuangkan melalui partai politik. Tanpa pembatasan-pembatasan legal pun, partai-partai politik yang teralienasi dari rakyat, tidak saja akan tersingkir dari panggung politik, tetapi juga akan mati sendiri.”

Partai politik yang sudah mulai terlena dengan kekuasaan sehingga jauh dari pelaksanaan fungsinya harus segera disadarkan. Seharusnya partai politik melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dipaparkan oleh Ramlan Surbakti dalam Koirudin (2004: 86):

“fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh partai politik adalah: 1) Fungsi artikulasi kepentingan, disini partai politik melakukan peng *input-an* berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompok dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik; 2) Fungsi agregasi kepentingan, agregasi kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang

mengagregasikan diri atau diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama didalam partai politik baik dalam upaya membawa masyarakat atau bangsa pada tingkat modernisasi yang tinggi sampai membawa peran penentu kebijakan; 3) Fungsi sosialisasi politik, yang terfokus untuk lebih memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara; 4) Fungsi rekrutmen politik, partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat terutama menyediakan kader-kader yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif; 5) Fungsi komunikasi politik, partai politik harus bisa mengelola komunikasi di internal paratiai politik baru kemudian berbicara komunikasi politik dengan pihak luar.

Rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi partai yang berorientasi dalam merekrut kader-kader partai untuk kelangsungan partai politik. Menurut Sunggono(1992:13):

“bahwa dalam rangka menjalankan fungsi rekrutmen, partai politik biasanya berusaha untuk menarik minat para warga negara agar bersedia menjadi aktivis partai, dengan jalan demikian, maka partai politik sebenarnya turut serta pula dalam meluaskan partisipasinya warga negara dibidang politik, caranya dengan melalui kontak-kontak secara pribadi, persesuai dan sebagainya. Dengan rekrutmen politik itu, partai dapat menyeleksi anggota-anggoata ataupun aktivis-aktivisnya yang berbakat untuk dipersiapkan sebagai kader pemimpin dimasa depan yang akan menggantikan pemimpin yang lama (*selection of leadership*).

Seperti yang diungkapkan oleh Sunggono diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen memiliki peranan yang sangat strategis karena: 1) dapat menghimpun massa sebanyak-banyaknya inilah yang nantinya akan memberikan dukungan pada partai politik untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum, dan 2) parpol juga akan mendapatkan kader yang nantinya akan menjadi penggerak partai, pengkoordinasi massa, dan menjamin kelangsungan hidup partai.

Dalam konteks Indonesia terutama di era Reformasi landasan formal rekrutmen politik adalah UU no 2 tahun 2011 pasal 29 terkait partai yang mana

dalam melakukan rekrutmen partai harus: 1) Dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; 2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan; 3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dan tolak ukur partai dalam melakukan rekrutmen partai harus mempertimbangkan seleksi kaderisasi, menggunakan prosedur terbuka dan demokrasi.

Rekrutmen politik di Indonesia sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru fungsi partai tidak berjalan dengan baik karena partai lebih menitik beratkan untuk menjadi kaki tangan pemerintah dari pada menjadi penyalur aspirasi rakyat sehingga fungsi parpol melemah, termasuk juga fungsi rekrutmen. Situasi ini digambarkan oleh Sunggono (1992: 176):

“sebagai ketidak berfungsian partai-partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen anggotanya yang tidak berjalan, karena tidak adanya atau sempitnya kesempatan untuk merekrut, melatih, dan menyeleksi kader-kader yang diorbitkan, di samping itu orang-orang cenderung tidak tertarik atau setidak-tidaknya kurang bergairah untuk menjadi aktivis maupun kader partai, karena adanya klik-klik di dalam tubuh partai sendiri, serta gaung konflik yang terus. Akibat fenomena inilah maka banyak partai berguguran dan melahirkan partai tunggal karena partai inilah yang slalu menjadi kaki tangan pemerintah”.

Sedangkan pada era reformasi rekrutmen politik juga masih belum tertata dengan baik. Pada era ini justru timbul banyak konflik yang terjadi di antara tubuh partai politik itu sendiri karena rekrutmen yang tidak prosedural sehingga *out-put* yang dihasilkan juga kurang. Seperti yang dipaparkan oleh Khoirudin (2004:128)

“kedewasaan politik para kader partai juga masih dipertanyakan. Sering kita melihat pelanggaran aturan-aturan partai oleh para kadernya sendiri. Banyak konflik internal partai yang muncul karena persoalan ini. Ada pula beberapa parpol yang mengalami perpecahan internal, bahkan beberapa sampai mendirikan partai baru karena ketidakpuasan baik personal maupun organisatoris pada partainya. Beberapa fenomena yang menunjukkan hal ini kepada kita adalah kasus pemecatan Matori Abdul Djali dari ketua umum DPP PKB pasca Sidang Istimewa MPR pelengseran Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan, konflik Hartono Marjono dengan ketua DPP partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Konflik Bachtiar Chamsyah dengan ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, dan lain sebagainya.”

Beberapa contoh yang dipaparkan oleh Khoirudin di atas memperlihatkan konflik yang sering terjadi pada tubuh partai akibat dari pelaksanaan fungsi rekrutmen partai yang tidak secara prosedural. Andaikata perekrutan dilakukan secara prosedural yaitu melalui prosedur yang jelas seperti pendapat Almond dan Powell partai politik dalam melakukan prosedur rekrutmen dibagi menjadi dua yaitu prosedur tertutup dan prosedur terbuka, tahapan yang runtut seperti paparan (Noris;Katz and Cotty, dalam Pamungkas 2012: 93) yang meliputi tahapan sertifikasi, nominasi, dan pemilu, dan pola-pola yang dapat dipertanggungjawabkan seharusnya rekrutmen politik berjalan dengan maksimal. Sayangnya partai politik masih mengabaikan beberapa persyaratan rekrutmen di atas.

Rekrutmen politik di Tahun 2014 ini parpol sudah mulai kembali memperhatikan kembali arti pentingnya melakukan rekrutmen politik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan baik oleh partai politik, maupun Undang-undang seperti yang disampaikan oleh Rahmadania dalam

<http://Rekrutmen.Calon.Legislatif.Pada.Pemilu.2014.pdf>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 16.00).”

“Prosedur formalitas ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan partai dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti adanya pendaftaran, pengumpulan data-data administrasi keterangan pendidikan, keterangan kependudukan, keterangan surat berperilaku baik dan keterangan yang lain. Jalur informal politik juga menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting karena secara sosiokultural perkembangan politik yang ada.

Faktanya dalam tubuh Partai Amanat Nasional sendiri dalam melakukan prosedur perekrutan masih jauh dari pemenuhan persyaratan rekrutmen yang sesuai dengan aturan-aturan diatas. Adanya perekrutan yang hanya mengandalkan basis massa yang dimiliki oleh kader ini menjadi prioritas yang lebih penting dengan mengesampingkan prosedural perekrutan politik. Perekrutan yang lebih mengedepankan massa bisa dilihat dari masuknya kalangan selebritis Indonesia menjadi calon legislatif seperti yang disampaikan oleh Binayuliati dalam blognya:

“Partai Amanat Nasional sangat memprioritaskan rekrutmen anggota baru, namun Partai Amanat Nasional belum mampu untuk mempertahankan eksistensinya di tingkat lokal. Agar dapat tetap bertahan, Partai Amanat Nasional merekrut beberapa selebritis untuk dijadikan caleg Partai Amanat Nasional. Banyak yang meragukan kehadiran serta kemampuan para selebritis yang menjadi caleg Partai Amanat Nasional seperti: Eko patriot, Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Hengki Kurniawan, Iqbal Fauzi, dan lain sebagainya. (<http://binayuliawati.blogspot.com/2010/04/rekrutmen-politik.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 16.00).”

Padahal Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang masuk nominasi dalam pemilu di tahun 2014 ini. Munculnya Fenomena diatas tentunya menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa bagi Partai Amanat Nasional. Memang tidak dipungkiri dengan merekrut artis tentunya dukungan massa terhadap Partai Amanat Nasional juga akan bertambah akan tetapi ini juga akan menyisakan

persaingan hebat dalam tubuh partai itu sendiri terutama dengan kader partai itu sendiri.

Rekrutmen politik juga menyisakan permasalahan pada regenerasi partai yang kian memprihatinkan. Karena rekrutmen politik seharusnya menghasilkan kader yang siap untuk ditempatkan diposisi manapun akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Koirudin (2004: 107):

Kegagalan partai politik untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang berkualitas telah dicatat oleh sejarah. Kenyataannya, parpol hanya sibuk demi meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Mereka nyaris tidak memandang “perlu” untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan pemimpin-pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang masih setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan SDM dalam sebuah parpol. Kenyataan lagi menunjukkan bahwa kondisi parpol semakin parah manakala ia hanya berorientasi utama mendulang suara sebanyak mungkin tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas kadernya. Kader-kader partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin yang karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan.

Dan fakta-fakta yang dipaparkan oleh Koirudin di atas sampai sekarang masih terjadi dalam pemerintahan di Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja lama kelamaan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh orang yang berkepentingan saja.

Dari persoalan diatas terkait rekrutmen politik baik dari prosedur yang digunakan oleh Partai, rekrutmen yang berdasarkan popularitas, dan persaingan dalam intern partai menjadi dorongan kuat bagi peneliti untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh lagi terkait pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik terutama dalam Partai Amanat Nasional.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik Partai Amanat Nasional di Ponorogo. Untuk mengetahui persoalan rekrutmen tersebut dapat di verifikasi ke dalam sub.pembahasan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah prosedur rekrutmen politik dalam Partai Amanat Nasional kabupaten Ponorogo?
- 1.2.2 Bagaiman tahapan-tahapan rekrutmen politik dalam Partai Amanat Nasional di kabupaten Ponorogo?
- 1.2.3 Bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional?

1.3 BATASAN KONSEP + VARIABEL

1.3.1 Batasan Konsep

1.3.1.1 Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah wadah untuk berorganisasi di bidang politik sebagai penyatuan visi dan misi yang menanamkan nilai-nilai untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bagus dan tentunya sebagai sarana memperoleh kekuasaan. Dalam partai politik, tentunya memiliki tujuan dan fungsi yang memang dalam prosesnya harus dijalankan. Karena ketika partai politik tidak memiliki tujuan yang jelas ia seperti kehilangan arah mata angin yang akan membuatnya tersesat kehilangan arah. Fungsi partai Politik juga sangat jelas baik

berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penghimpun dan penyerap aspirasi serta sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik juga memiliki karakteristik atau tipologi yang berbeda-beda, ada beberapa jenis partai politik yang mulai berkembang seperti partai kader, partai massa, dan lain sebagainya. Ini merupakan dampak dari adanya tujuan dan fungsi yang berbeda dari yang diterapkan oleh masing-masing partai politik yang ada di Indonesia. Sehingga jelas ketika nantinya dalam partai politik juga tidak terlepas dengan yang namanya keanggotaan dan kedaulatan anggota. Yang mana keanggotaan ini sangat diperlukan untuk menjalankan roda partai politik. Ini akan berjalan jika fungsi rekrutmen politik juga berjalan sebagaimana mestinya.

1.3.1.2 Konsep Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan suatu proses untuk merekrut atau menyeleksi masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya atau ditunjuk untuk mengisi kursi-kursi penting di dalam peranan politik. Termasuk dalam jabatan birokrasi (eksekutif dan legislatif) dan jabatan administrasi publik lainnya.

Tentunya agar pelaksanaan fungsi rekrutmen politik ini berjalan dengan baik kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan yang ada dalam proses rekrutmen sendiri agar kedepannya rekrutmen yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu juga harus dipertimbangkan lagi pola-pola dari tiap partai politik dalam melakukan rekrutmen politik karena jangan sampai terjadi jual beli kader, atau bahkan lompatan kader dari partai yang lain. Karena ini akan menjatuhkan

legitimasi parpol dimata masyarakat jika nanti kadernya tidak bekerja dengan baik dan menjadikan parpolnya sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingannya.

1.3.2 Batasan Variabel

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Partai Politik	Partai Amanat Nasional Rekrutmen Politik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi Parpol ➤ Tujuan dan fungsi Parpol ➤ Fungsi Rekrutmen Politik Partai Politik ➤ Definisi ➤ Prosedur ➤ Tahapan ➤ Pola
2	Dinamika Parpol di Indonesia	Dinamika Parpol	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Politik dan Demokrasi ➤ Parpol di era reformasi ➤ Dinamika Partai Amanat Nasional

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dalam Partai Amanat Nasional kabupaten Ponorogo yang kemudian lebih di verivikasi kedalam sub-pembahasan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui prosedur Rekrutmen politik dalam Partai Amanat Nasional kabupaten Ponorogo.
- 1.4.2 Untuk mengetahui Tahapan apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam melakukan rekrutmen Politik.
- 1.4.3 Untuk mengetahui Bagaimana Pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/ manfaat penelitian ini yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut;

1.5.1 Bagi diri sendiri:

- 1.5.1.1 Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti terkait pelaksanaan fungsi Partai politik.
- 1.5.1.2 Untuk lebih memahami sejauh mana fungsi rekrutmen partai politik dilaksanakan khususnya pada Partai Amanat Nasional di kabupaten Ponorogo
- 1.5.1.3 Menambah pengetahuan dan informasi terkait prosedur, tahapan, dan pola yang mempengaruhi proses Rekrutmen politik.
- 1.5.1.4 Menambah *link* / jaringan di bidang politik terkusus di Partai Amanat Nasional.

1.5.2 Bagi Mahasiswa

1.5.2.1 Memberikan referensi terkait pelaksanaan fungsi partai politik baik dalam prosedur rekrutmen politik, tahapan, dan pola proses rekrutmen partai politik pada mata kuliah Ilmu Politik.

1.5.2.2 Memberikan kesempatan bagi peneliti lanjutan untuk bidang yang sama.

1.5.3 Bagi Masyarakat

1.5.3.1 Memberikan wawasan baru khususnya dibidang politik mengingat masyarakat disini bisa jadi komentator dan memonitoring dalam kancah perpolitikan di kabupaten Ponorogo.

1.5.3.2 Memberikan informasi kepada masyarakat terkait prosedur, tahapan, dan pola, yang mempengaruhi proses rekrutmen politik.

1.5.3.3 Memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya bilamana masyarakat ingin terjun langsung menjadi aktor politik dan belum menemukan *link*/jaringan.

1.5.4 Bagi Partai Politik

1.5.4.1 Menambah legitimasi dimasyarakat terkait keterbukaan dan transparansinya proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional.

1.5.4.2 Menambah wawasan terkait pentingnya dilakukan rekrutmen politik yang sesuai prosedur atau sesuai kebutuhan dari partai politik itu sendiri.

1.5.4.3 Memberikan sumbangsih nyata terkait kesadaran politik bagi seluruh kader dan anggota partai politik.